

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perekonomian khususnya kemiskinan merupakan suatu tantangan terbesar yang dihadapi seluruh negara di dunia saat ini (Rispan et al, 2025). Jutaan orang masih hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ditengah gempuran era teknologi dan globalisasi. Garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kondisi ini bervariasi di setiap negara, tetapi secara umum mencerminkan standar hidup minimal yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Badan Pusat Statistik (2022) mengatakan bahwasanya kemiskinan adalah kondisi ketika seorang individu tau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan di Indonesia terus berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang berlangsung secara spasial namun tidak selalu terencana secara sistematis, sehingga belum mampu mengatasi ketimpangan secara menyeluruh (Wahed et al., 2022).

Tren kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam periode belakangan ini tren, Menurut Millenia Putri & Zaini Putri (2021) upah riil, pengangguran, serta faktor makroekonomi lainnya merupakan penyebab umum kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat berada dalam kisaran 9-10% dalam kurun waktu lima tahun. Angka ini tergolong tinggi bagi suatu negara. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia berfluktuasi

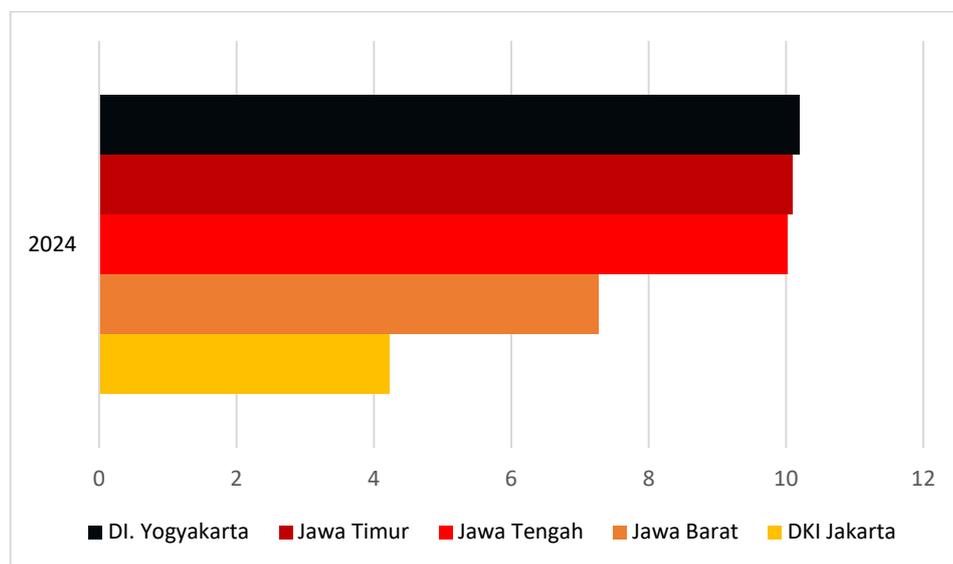
setiap tahun, secara keseluruhan, dalam beberapa periode angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan (Sekarwati, 2024).

Indonesia termasuk negara berkembang yang terus melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Selama periode pembangunan, tantangan berat seperti kemiskinan perlu segera diatasi untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Fenomena kemiskinan telah menjadi masalah paling mendasar yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi pada negara berkembang, hal ini terbukti dengan persentase penduduk miskin yang masih cukup besar. Persoalan lain yang muncul akibat kemiskinan dapat dipicu oleh rendahnya kualitas hidup manusia, meningkatnya jumlah penduduk miskin setiap tahun, serta upah minimum yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup (Putri, 2024).

Kemiskinan sendiri disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya. Upaya dalam mengurangi kemiskinan di tingkat nasional telah menjadi prioritas utama pemerintah. Tingkat kemiskinan masih tetap tinggi di beberapa kota maupun kabupaten di Indonesia, salah satunya termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penduduk miskin umumnya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya alam, yang juga sering kali berkualitas rendah. Keterbatasan ini berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga berdampak pada produktivitas yang rendah dan pada akhirnya berujung pada upah yang kecil. Seseorang perlu memiliki pendidikan yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Menurut Yang & Qiu, mobilitas dan ketimpangan pendapatan dapat

dijelaskan melalui faktor bawaan serta investasi keluarga dalam pendidikan sejak dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna di dunia kerja (Hindun et al., 2019). Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan.

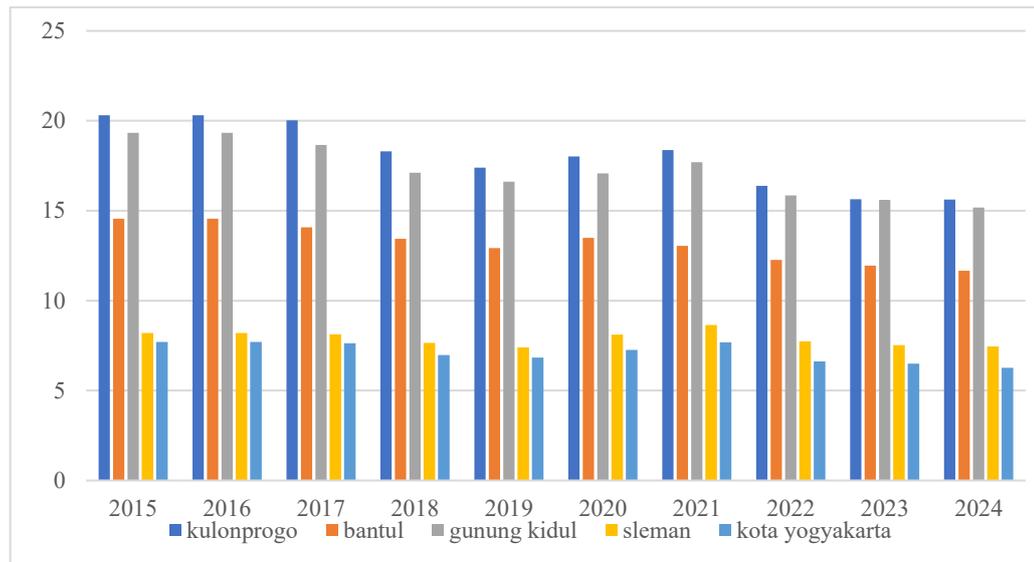


Gambar 1.1. Persentase Kemiskinan Pulau Jawa
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia)

Berdasarkan gambar 1.1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang paling miskin pada tahun 2024 diantar ke-empat provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, walaupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata di Indonesia. Namun, di balik citra tersebut, DIY menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, terutama terkait tingkat kemiskinan yang tertinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan berbagai indikator ekonomi, seperti gini rasio, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum, kesenjangan ekonomi di provinsi ini menjadi perhatian serius.

Fenomena pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan Ragnar Nurkse (2012) yang menjelaskan bahwa kemiskinan berulang karena rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan masih tinggi karena banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan upah rendah, sulit mengakses modal, dan memiliki daya saing terbatas. Selain itu, sektor pariwisata yang berkembang belum sepenuhnya menguntungkan masyarakat kecil pada Provinsi DIY.

Kondisi ini diperburuk oleh tingkat pengangguran yang tinggi, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan masyarakat (Julianti, 2022). Masyarakat yang terdampak pengangguran menghadapi masalah ekonomi makro yang serius, di mana peningkatan pendapatan menjadi faktor kunci dalam mengatasinya. Pendapatan hanya dapat meningkat jika tenaga kerja dimanfaatkan secara optimal, sedangkan tingginya tingkat pengangguran justru memperburuk kesejahteraan dan kemakmuran secara keseluruhan (Aleffin, 2024). Oleh karena itu, keterkaitan antara kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan rendah semakin memperkuat lingkaran kemiskinan di DIY, yang hanya dapat diputus dengan peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi yang lebih inklusif.

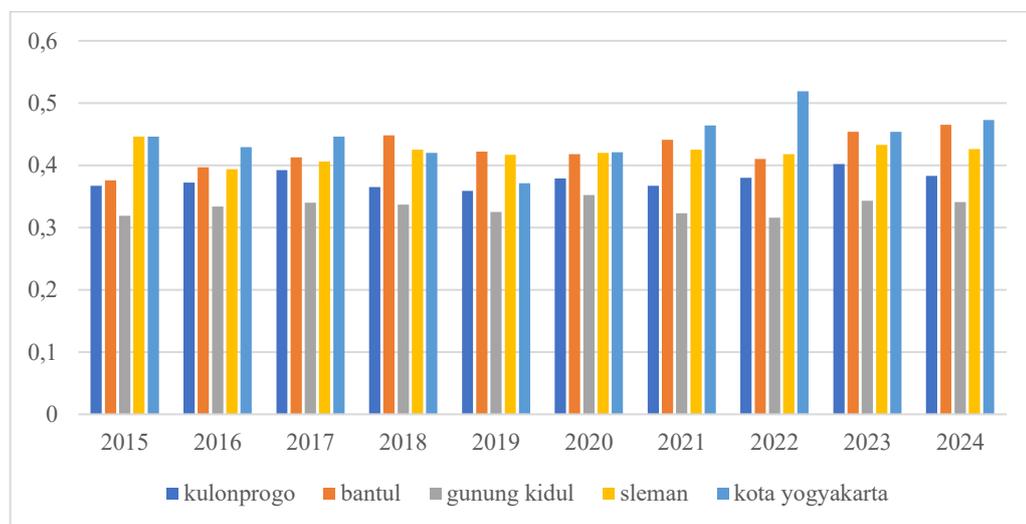


Gambar 1.2. Kemiskinan Provinsi DIY
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik DIY)

Berdasarkan angka persentase kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2024 menunjukkan adanya fluktuasi di setiap wilayahnya. Wilayah yang paling tinggi persentase adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu 15,62 persen dan selama 10 tahun terakhir memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi diantara kabupaten/kota lain. Persentase kemiskinan terendah ada di Kota Yogyakarta yaitu 6,26 persen.

Mengacu pada data tahun 2015 hingga 2024, kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkembang menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. Kondisi ini tidak hanya berisiko menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh melalui strategi pemulihan ekonomi yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (Mutmainnah & Utomo Jepri, 2024).

Namun, ketimpangan kemiskinan dapat semakin parah jika distribusi pendapatan tidak merata. Ketimpangan Pendapatan akan terjadi pada tahap awal Pertumbuhan Ekonomi. Distribusi pendapatan akan memburuk di masa sekarang, namun ditahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana tingkat pendapatan memengaruhi kemiskinan di daerah tersebut.



Gambar 1.3. Rasio Gini Provinsi DIY
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik DIY)

Ketimpangan merupakan masalah yang masih sangat perlu diperhatikan, berdasarkan tabel gini rasio kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada rentang waktu 10 tahun, bahwasanya dapat diketahui kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada ditingkatan sedang karena berada di angka 0.3 hingga 0.5. Rata – rata ketimpangan pendapatan tahun 2024 rata – rata ketimpangan pendapatan tidak naik secara signifikan dari tahun sebelumnya hanya naik sebesar 0.002, tetapi pada tingkatan daerah pengkatanya cenderung fluktuatif. Kabupaten Kulonprog, Gunung Kidul,

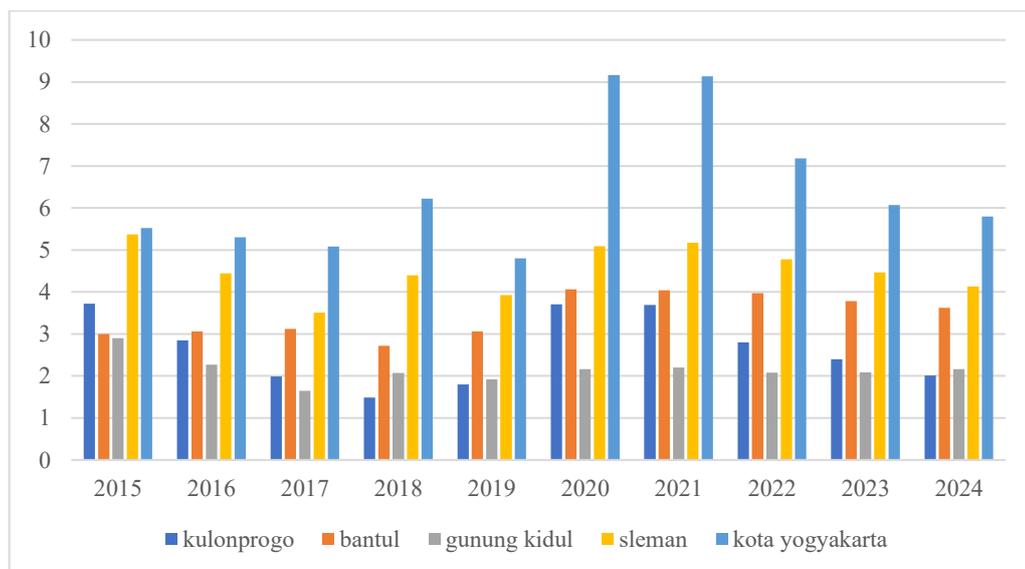
dan Sleman sebagai contoh yang mengalami penurunan ketimpangan serta Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang mengalami kenaikan..

Sukirno (dalam Gurusinga et al., 2022) mengatakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, terdapat dua konsep utama, yakni ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut mengukur disparitas pendapatan berdasarkan parameter dengan nilai mutlak, tanpa mempertimbangkan perbandingan dengan keseluruhan distribusi. Sementara itu, ketimpangan relatif menilai distribusi pendapatan dengan membandingkan pendapatan individu atau kelompok tertentu terhadap total pendapatan masyarakat, sehingga memberikan gambaran lebih proporsional mengenai kesenjangan ekonomi.

DIY sering mencatatkan Gini Rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, menandakan kesenjangan yang lebar antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah (Mustari, 2024). Kesenjangan ini berakar dari dominasi sektor informal, rendahnya akses terhadap pekerjaan layak, serta ketimpangan kepemilikan aset dan sumber daya ekonomi (Anami & Haqan, 2024). Kesenjangan ini berpotensi terus berlanjut dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan di DIY jika tanpa intervensi kebijakan yang efektif, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kebijakan redistribusi ekonomi yang lebih inklusif.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dinamika tenaga kerja, terutama ketika peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan ini dapat memicu lonjakan pengangguran, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk

kesenjangan pendapatan (Laut et al., 2020). Tingginya TPT mengindikasikan bahwa banyak penduduk usia produktif yang tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, karena potensi tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Wahyu Sugandi & Tisnawati, 2023).



Gambar 1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DIY
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik DIY)

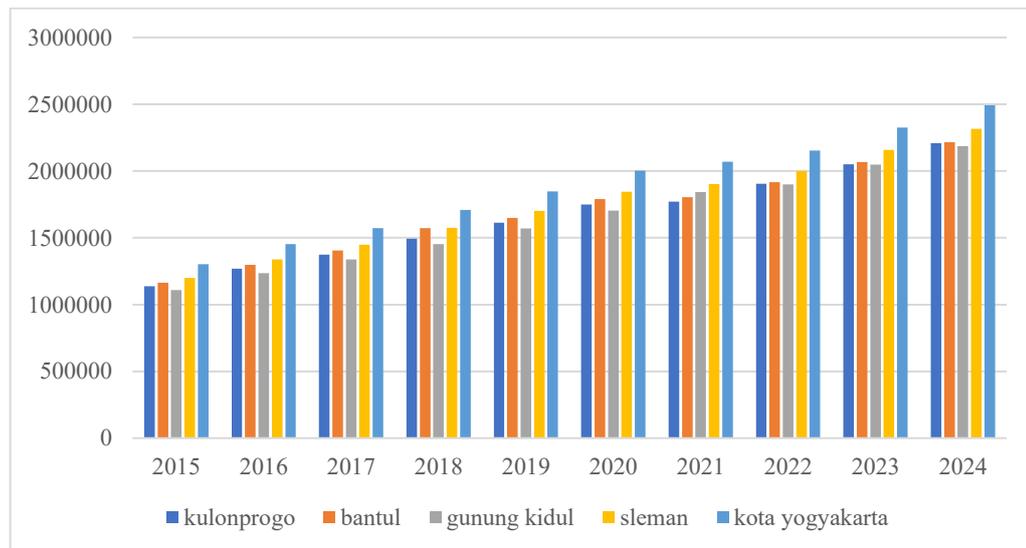
Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka yang disajikan, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2024 memiliki tingkat pengangguran terbuka yang berbeda di tiap wilayahnya yang mengindikasikan adanya ketimpangan pengangguran yang terjadi. Tahun 2024 hingga tahun sebelumnya menunjukkan Kota Yogyakarta konsisten dengan berada di nomor pertama tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang mencapai 5,8 persen, disusul oleh Kabupaten Sleman yang berada di angka 4,13 persen di tahun yang sama. Selain itu, Kabupaten Kulonprogo memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah di angka 2,01 persen di tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun DIY dikenal sebagai kota pelajar dengan ribuan lulusan setiap tahunnya, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Menurut (Erwandy & Buulolo, 2024) mengatakan hal ini menyebabkan banyak lulusan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga berkontribusi pada angka pengangguran yang relatif tinggi.

N. Gregory Mankiw (2018) dalam bukunya mengatakan bahwa pengangguran didefinisikan sebagai kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk peningkatan tingkat kemiskinan. Ketika seseorang menganggur, mereka kehilangan sumber pendapatan utama, yang dapat menyebabkan penurunan standar hidup dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan dapat mengakibatkan hilangnya keterampilan dan menurunkan daya saing individu di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pengangguran dan kemiskinan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang layak. Namun, dampaknya terhadap kemiskinan tidak selalu mudah diprediksi. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja berupah rendah, tetapi di sisi lain, jika ditetapkan terlalu tinggi, dapat menyebabkan peningkatan

pengangguran atau pengurangan tenaga kerja (Hasibuan & Handayani, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan upah minimum memengaruhi tingkat kemiskinan, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1.5. Upah Minimum Provinsi DIY
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik DIY)

Menurut tabel data upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2024 mengalami kenaikan di tiap tahunnya yang merupakan sesuatu yang baik, tetapi pada tingkat kabupaten/kota terlihat masih ada perbedaan antar wilayahnya. Satu wilayah perkotaan yaitu Kota Yogyakarta memiliki upah minimum tertinggi pada tahun 2024 mencapai 2.492.997 yang memimpin sudah dari tahun-tahun sebelumnya, dan Kabupaten dengan upah minimum terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 2.188.041. Data tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan penetapan upah minimum.

Menurut Agustina (2018), Upah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan, karena pendapatan masyarakat dapat mencapai

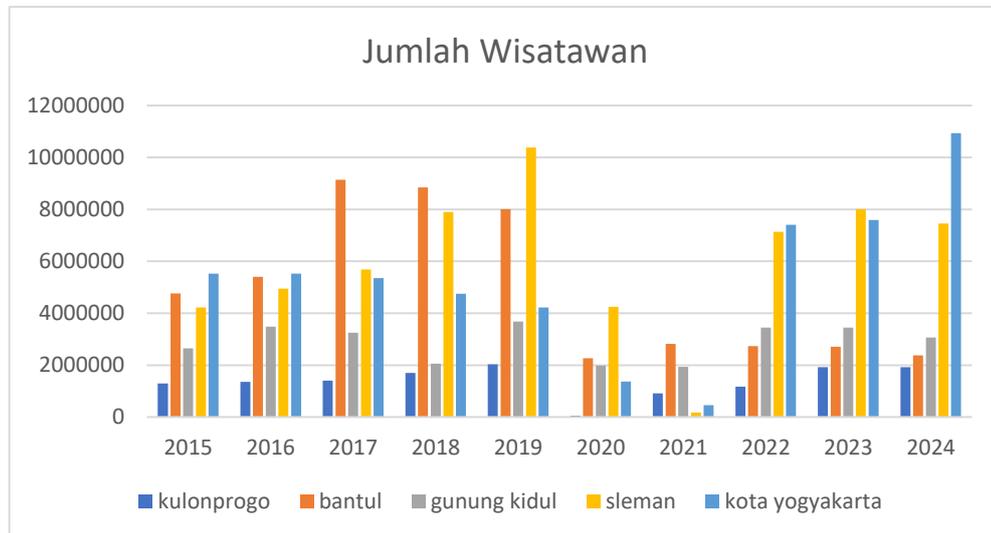
tingkat optimal apabila kesempatan kerja penuh dapat terwujud. Kebijakan upah minimum diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah DIY Dalam upaya mengatasi kemiskinan telah menerapkan berbagai strategi, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang tercermin dari kenaikan signifikan pada upah minimum di wilayah tersebut.

Upah minimum yang lebih rendah ini disebabkan oleh struktur ekonomi DIY yang didominasi oleh sektor jasa, pendidikan, dan UMKM, yang sebagian besar tidak mampu memberikan upah tinggi (Putri, 2024). Akibatnya, daya beli masyarakat tetap rendah. Selain itu, banyak pekerja hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Menurut Rahmawati (2023) peningkatan upah minimum diperlukan agar pekerja memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan tersebut seimbang dengan pertumbuhan produktivitas dan kondisi ekonomi yang berlaku. Selain itu, tingginya angka kemiskinan juga disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tidak mampu menampung pertumbuhan angkatan kerja, yang pada akhirnya memperparah tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Jika jumlah wisatawan meningkat bersamaan dengan kenaikan upah minimum yang seimbang, kemiskinan dapat berkurang karena pendapatan pekerja dan peluang kerja bertambah. Pariwisata mendorong ekonomi, sedangkan upah layak memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, jika pariwisata maju tetapi upah tetap rendah, keuntungan hanya dinikmati segelintir pelaku usaha,

sementara pekerja tetap berpenghasilan rendah. Di DIY, sinergi keduanya berpotensi besar menurunkan kemiskinan, asalkan disertai pelatihan tenaga kerja lokal dan perlindungan pekerja informal.



Gambar 1.6. Jumlah Wisatawan Provinsi DIY
(Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik DIY)

Tabel tersebut memperlihatkan jumlah wisatawan di lima kabupaten/kota Provinsi DIY dari 2015 hingga 2024. Sebelum pandemi (2015–2019), jumlah kunjungan terus meningkat, dengan Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi tujuan utama, sementara Kulon Progo terendah. Pandemi 2020–2021 membuat kunjungan anjlok di semua daerah. Sejak 2022, wisata kembali pulih dan memuncak pada 2024, saat Kota Yogyakarta mencatat lebih dari 11 juta kunjungan. Data ini menunjukkan bahwa pariwisata DIY cepat tumbuh, namun sangat dipengaruhi kondisi eksternal seperti pandemi.

Menurut UNWTO dalam (Rohmat & Indrawati, 2022) , pariwisata berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan kerja baru, menambah devisa, dan mendorong pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas terkait determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Alifah K (2023) mengatakan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapat yang berbeda dikemukakan Setya M (2024) pada penelitiannya mengatakan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian lain yang membahas terkait ketimpangan pendapatan yang dilakukan oleh Dongoran et al (2023) menunjukkan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al (2024) menyatakan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan di provinsi Sumatera Utara.

Menurut penelitian terdahulu mengenai upah minimum yang di lakukan oleh Desmawan et al (2024) mengatakan upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mauludi et al (2023) mengatakan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Provinsi Jawa Timur.

Penelitian terdahulu terkait jumlah wisatawan yang dilakukan oleh Rohmat et al (2022) mengatakan jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi jawa tengah. Namun pada penelitian yang dilakukan Nugraha et al (2020) mengatakan jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali.

Perbedaan dari hasil beberapa penelitian sebelumnya sangatlah bervariasi. Berdasarkan pemilihan hasil penelitian dengan wilayah yang sama, maupun wilayah yang berbeda akan selalu ada perbedaan dengan hasil penelitian tersebut. Maka dari itu, untuk memahami lebih jauh apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan teori lingkaran kemiskinan serta analisis menggunakan pendekatan ekonometrika diharapkan memberikan wawasan lebih dalam mengenai tren dari determinan yang mempengaruhi kemiskinan serta membantu mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan jumlah wisatawan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai beberapa tujuan berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan jumlah wisatawan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada tiga variabel utama, yaitu ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan jumlah wisatawan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data dari tahun 2015 hingga 2024, yang mencakup kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan ekonometrika untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tidak akan mencakup analisis faktor-faktor lain di luar variabel yang telah ditentukan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi dunia akademis dengan meningkatkan wawasan mengenai dinamika kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di daerah tertentu. Hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai kemiskinan di Indonesia atau daerah lain. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan contoh penerapan metode analisis ekonometrika dalam studi kemiskinan, yang dapat diadaptasi oleh peneliti lain untuk penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan program-program sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.